
ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Hasanuddin¹, Taryono², Efan Yudha Winata³

Program Studi Magister Manajemen Inovasi, Universitas Teknologi Sumbawa¹²³

*Corresponding Author : anmibian82@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan pendidikan merupakan serangkaian aktivitas penerimaan, pengelolaan dan penggunaan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sumber dana pendidikan yang diperoleh dapat berasal dari APBN, APBD, dan orang tua peserta didik, sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk menciptakan pendidikan yang layak dan bermutu bagi generasi emas bangsa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1). untuk menganalisis sistem pengelolaan biaya pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumbawa Barat; dan 2). untuk menganalisis komponen pembiayaan pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga dapat dirumuskan inovasi daerah sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan pembiayaan pendidikan menuju pendidikan yang bermutu di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian Mixed Method Research (MMR) menggunakan Concurrent Triangulation Design. Penentuan jumlah sampel menggunakan ketetapan Isaac dan Michael dan diambil dengan teknik Clustered Random Sampling dan Purposed Sampling. Pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara dan literatur yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumbawa Barat berasal biaya investasi dan operasional yang bersumber dari APBN dan APBD, serta biaya personal yang bersumber dari APBD dengan sistem pengelolaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Terdapat 6 komponen pembiayaan tidak langsung yang belum tersentuh dan hingga saat ini masih membeni orang tua peserta didik. Sehingga diperlukan pengalokasian bantuan biaya pendidikan dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan beasiswa miskin berprestasi sebagai bentuk inovasi daerah sebagai upaya percepatan perwujudan pendidikan yang layak dan berkualitas di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kata kunci: Analisis Pembiayaan, Biaya Pendidikan, Pendidikan Sekolah Dasar

Abstract

Financing of education is expected to be an activity of receiving, managing and using to support the implementation of education to achieve the stated goals. Sources of education funds obtained from the APBN, APBD, and parents of students, as a form of shared responsibility to create decent and quality education for the nation's golden generation. The objectives of this study are: 1) to analyze the education cost management system at the Elementary School (SD) level in West Sumbawa Regency; and 2). to analyze the components of education financing that must be issued by parents of students at the elementary school (SD) level in West Sumbawa Regency, so that regional innovations can be formulated as an effort to optimize the implementation of quality education financing in West Sumbawa Regency. This research is a Mixed Method Research (MMR) using Concurrent Triangulation Design. Determination of the number of samples using Isaac and Michael's accuracy and taken with the technique of Clustered Random Sampling and Purposed Sampling. Collecting data using questionnaires and interviews. The results of this study indicate that the funding for education at the Elementary School (SD) level in West Sumbawa

Regency comes from investment and operational costs sourced from the APBN and APBD, as well as personal costs sourced from the APBD with a management system in accordance with applicable regulations and provisions. There are 6 components of indirect financing that are not yet available, which still support the parents of students. So that it is necessary to allocate education cost assistance from the local government in the form of scholarships for poor achievement as a form of innovation as an effort to realize decent and quality education in West Sumbawa Regency.

Keywords : Financing Analysis, Education Financing, Elementary School in West Sumbawa Regency

A. PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas adalah komponen penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa demi mewujudkan amanat negara sesuai yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Hakim, 2016; Gunawan, 2020; Inkiriwang, 2020). Pendidikan yang berkualitas dapat dicapai dengan adanya dukungan, peran, serta keseriusan dari semua pihak terkait. Dukungan tersebut berupa pengembangan kualifikasi pendidik, peningkatan mutu, sarana prasarana (Timor, 2018; Mesiono & Haidir, 2020) serta pembiayaan pendidikan yang layak (Hastina, dkk., 2020; Sudarmono, dkk., 2021).

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu masalah pokok di dunia pendidikan yang mempengaruhi keunggulan pendidikan yang akan diperoleh peserta didik di suatu daerah (Ferdi, 2013; Togatorop, 2017; Waliyah, dkk., 2021). Penyelenggaraan pendidikan memerlukan adanya dukungan pembiayaan pendidikan yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Muslim, 2011), berupa pengadaan sarana dan prasarana hingga perlengkapan personal siswa dalam kegiatan belajar mengajar (Nida, 2018). Sehingga, mewujudkan pendidikan yang berkualitas merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penunjang pelaksanaan pendidikan di daerah yakni berupa penyelenggaraan pembiayaan pendidikan.

Besaran alokasi pembiayaan pendidikan yang dibebankan pada negara

dan daerah. Dijelaskan dalam ketentuan yang menyebutkan bahwa negara memprioritaskan biaya pendidikan paling tidak 20% (dua puluh persen) dari APBN serta dari anggaran APBD agar terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan pendidikan nasional. Begitu pula yang tertuang dalam ketentuan selanjutnya yang menjelaskan bahwa anggaran pendidikan selain penghasilan yang diperoleh pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APB pada sektor pendidikan dan paling sedikit 20% APBD (Depdiknas, 2003). Sehingga alokasi dana pembiayaan pendidikan yang berasal dari negara berfungsi untuk menjangkau seluruh jenjang pendidikan di seluruh Indonesia (Rustiawan, 2017). Guna optimalisasi mutu pendidikan di daerah, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan berupa operasional dasar pendidikan (Kurniady, 2011).

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas mengharuskan pemerintah daerah untuk ikut mengambil peran dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Namun keikutsertaan dan keseriusan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh kesadaran pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat akan pentingnya optimalisasi mutu pendidikan dalam mewujudkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas guna mendukung perwujudan daerah yang membangun kualitas hidup masyarakatnya.

Pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa Barat, pembiayaan pendidikan diterima dalam bentuk subsidi yang berasal dari negara, daerah, iuran siswa, serta sumbangan masyarakat. Sehingga jenjang sekolah dasar telah memperoleh dan memenuhi kebutuhan operasional yang ada di sekolah dalam penyelenggaraan pembiayaan pendidikan yang ditanggung pada pemerintah sehingga tidak lagi diperkenankan adanya pungutan dalam bentuk dan tanggungan apapun kepada orang tua siswa (Syahbuddin, 2020; Setyoningsih & Ismanto, 2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa pemerintah pusat menyediakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk menyediakan pendanaan berupa biaya operasional yang ada di sekolah dan bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik (Depdiknas, 2020). Dalam peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa tujuan dari BOS Reguler adalah 1) menunjang biaya operasional sekolah dan 2) meningkatkan aksesibilitas serta mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik (Depdiknas, 2020).

Sabiq (2021) menyatakan keterlaksanaan dan keberlanjutan pendidikan tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menyediakan Program Indonesia Pintar (PIP) guna menyokong peserta didik yang mengalami permasalahan pembiayaan pendidikan. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan yang berupa uang tunai, pengembangan akses, serta kesempatan belajar yang bersumber dari bantuan pemerintah dan diperuntukkan kepada peserta didik serta mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan (Depdiknas, 2020).

Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler saat ini telah menjadi alternatif dan solusi terbaik yang ditawarkan untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan (Caya, dkk., 2019; Asnawi,

dkk., 2021; Latief & Latief, 2015). Namun tidak semua alokasi dana pendidikan melalui program bantuan PIP maupun BOS mampu memenuhi kebutuhan dunia pendidikan seluruhnya (Hendriyani & Maqin, 2018). Berdasarkan studi pendahuluan yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwa pada beberapa sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat masih membebani biaya pendidikan pada orang tua peserta didik yang belum masuk dalam daftar kebutuhan pendidikan yang didanai oleh negara dan daerah. Hal inilah yang menyebabkan orang tua mengalami kesulitan untuk mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

Sehingga, untuk mengetahui masalah pembiayaan pendidikan yang masih membebani orang tua, diperlukan adanya studi mendalam tentang analisis biaya pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumbawa Barat yang bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan biaya pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan menganalisis serta merumuskan strategi optimalisasi pembiayaan pendidikan di daerah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bentuk inovasi daerah dalam menentukan program lanjutan berupa "Program Pariri Cerdas" yang dapat menunjang serta optimalisasi peran daerah dalam pembiayaan pendidikan guna percepatan perwujudan pendidikan yang layak dan berkualitas di Kabupaten Sumbawa Barat.

B. LANDASAN TEORI Pembiayaan Pendidikan Sebagai Bentuk Investasi Daerah

Penyelenggaraan pendidikan sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen penunjang proses pendidikan. Karena pembiayaan pendidikan adalah salah satu komponen esensial serta tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan (Ferdin, 2013). Komponen pembiayaan pendidikan adalah komponen produksi yang sangat menentukan kualitas dari penyelenggaraan pendidikan (Arifudin, dkk., 2021). Sebab kualitas

pendidikan yang baik merupakan suatu bentuk investasi yang cukup mahal (Sudarmono, 2021), namun akan menentukan kesejahteraan masyarakat kedepannya (Fattah, 2008). Sehingga pembiayaan pendidikan sesuai yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa pembiayaan dana pendidikan yaitu pendanaan pendidikan menjadi urusan bersama semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat (Handayani & Huda, 2020).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan serangkaian aktivitas penerimaan, pengelolaan dan penggunaan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sumber pendanaan pendidikan yang diperoleh dapat berasal dari APBN, APBD, serta masyarakat atau orang tua/wali murid (Winarsih, 2013). Sebagai upaya tanggung jawab bersama untuk menciptakan pendidikan yang layak dan bermutu bagi generasi muda bangsa.

Pemberlakuan desentralisasi sebagai akibat diterbitkannya peraturan perundang-undangan tentang otonomi pemerintahan daerah (Pemerintah Nasional, 1999) akan berdampak pada pelaksanaan manajemen dan tata kelola pendidikan yakni akan memberi ruang pergerakan yang cukup luas kepada pemerintah daerah sebagai pengelolaan pendidikan dalam penentuan dan perumusan strategi guna membangun pendidikan berkualitas dan mandiri di daerah. Karena kebijakan desentralisasi diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan pendidikan di daerah (Arsyad, 2018).

Tinggi rendahnya pembiayaan pendidikan di suatu daerah sangat ditentukan oleh jumlah dan skala institusi pendidikan, jumlah peserta didik, gaji tenaga pendidik yang disesuaikan dengan bidang kualifikasi, keahlian dan tingkat pendidikan yang dimiliki, rasio siswa dan guru, pertumbuhan penduduk, serta adanya perubahan kebijakan (revenue theory of cost) (Fattah, 2008).

Oleh sebab itu, manajemen pembiayaan yang efisien dan optimal sangat diperlukan. Karena pada dasarnya manajemen pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan dan arah pendidikan yang ditargetkan, melalui dari tahapan perencanaan pembiayaan, tahapan pelaksanaan, dan pengawasan) (Azhari & Kurniady, 2016).

Menurut J. Wisman (1987), terdapat tiga aspek yang sepatutnya dikaji dalam melihat peranan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan: 1) Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumber daya manusia/*human capital*; 2) Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan; 3) Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian *Mixed Method Research* (MMR) menggunakan *Concurrent Triangulation Design*. Penentuan jumlah sampel menggunakan ketetapan Isaac dan Michael dan diambil dengan teknik *Clustered Random Sampling* dan *Purposed Sampling*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan menggunakan form instrumen wawancara tentang pembiayaan pendidikan. Data kualitatif dikumpulkan dari hasil wawancara dan telaah literatur sehingga diperoleh informasi mendalam yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan.

Statistika deskriptif dipergunakan dalam analisis data pada penelitian ini, yakni metode-metode yang berkaitan langsung dengan pengumpulan dan representasi suatu data sehingga memberikan informasi yang bermanfaat (Walpole, 1995). Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data yang

diperoleh dari sampel atau populasi (Sugiyono, 2018). Selanjutnya data akan diterjemahkan dalam statistik deskriptif biasanya dalam bentuk ukuran pemusatan data (Kuswanto, 2012).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksisting bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat diaktualisasikan dalam beberapa program bantuan dana pendidikan untuk menunjang tercapainya sistem pendidikan yang berkualitas. Adapun program bantuan terkait dengan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada sekolah dan peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) berupa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program bantuan Seragam Sekolah Gratis Kabupaten Sumbawa Barat, dan Program Pengadaan Bus Sekolah Kabupaten Sumbawa Barat.

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya di singkat BOS merupakan bentuk program bantuan pembiayaan pendidikan oleh pemerintah yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknik Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat menyediakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk menyediakan alokasi pendanaan dan pembiayaan operasional yang diperuntukkan bagi sekolah dan bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Selanjutnya dalam peraturan tersebut juga dijelaskan tujuan dari BOS Reguler adalah untuk 1) menunjang biaya operasional sekolah dan 2) peningkatan aksesibilitas dan kualitas mutu pembelajaran bagi peserta didik di sekolah.

Informasi yang dikumpulkan, bahwa dana BOS yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Sumbawa Barat setiap tahunnya mengalami fluktuasi bergantung pada jumlah peserta didik serta kondisi dan keadaan sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain Program BOS, program Indonesia Pintar merupakan solusi yang diberikan pemerintah dalam menunjang keterlaksanaan dan keberlanjutan pendidikan khususnya dalam bantuan pembiayaan guna menunjang pendidikan bagi peserta didik yang mengalami permasalahan pembiayaan pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar dijelaskan bahwa alokasi bantuan berupa dana PIP merupakan pondasi dari terlaksananya program ini. Dalam peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan yang berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar yang bersumber dari pemerintah yang dialokasikan kepada peserta didik serta mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Selain itu, dana PIP yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Sumbawa Barat setiap tahunnya mengalami fluktuasi bergantung pada jumlah peserta didik yang menerima PIP sebagaimana penjelasan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk ikutserta dalam penyelenggaraan pembiayaan pendidikan sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penyelenggaraan pendanaan pendidikan dalam bentuk penyelenggaraan program pengadaan Bus Sekolah dan program bantuan Seragam Sekolah Gratis Kabupaten Sumbawa Barat yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada komponen biaya personal.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat saat ini telah mulai mengoperasikan Bus yang dianggarkan melalui APBD KSB untuk antar jemput siswa. Layanan transportasi sekolah tersebut merupakan serangkaian aktifitas dan kegiatan dalam pemberian fasilitas untuk melayani aksesibilitas peserta

didik yang bertujuan untuk memudahkan transportasi peserta didik dari dan menuju sekolah. Peserta didik dapat datang atau pulang sekolah dengan tepat waktu, sehingga disiplin waktu peserta didik akan meningkat. Layanan transportasi ini dapat diwujudkan dengan mengadakan atau menyediakan bus sekolah.

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 55 Tahun 2017 mendasari pelaksanaan program bantuan Seragam Sekolah Gratis. Pada peraturan tersebut yakni Pasal 5 disebutkan bahwa seragam sekolah gratis diberikan kepada siswa baru pada setiap jenjang satuan pendidikan mulai dari TK/PAUD, satuan pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP) baik sekolah negeri dan swasta tahun ajaran 2016/2017 dan siswa baru setiap jenjang satuan pendidikan jenjang TK/PAUD dan satuan pendidikan dasar (SD) tahun ajaran 2017/2018 dan tahun ajaran seterusnya. Pakaian seragam yang dimaksud dalam peraturan ini terdiri dari 2 jenis yaitu 1) pakaian seragam nasional untuk peserta didik putra dan putri, dan 2) pakaian seragam khas sekolah untuk peserta didik putra dan putri jenjang Pendidikan TK/PAUD.

Berkenaan dengan program bantuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD), dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa pakaian seragam nasional untuk jenjang SD/MI terdiri dari 2 jenis yaitu 1) kemeja warna putih, celana/rok warna merah hati, dan 2) kemeja warna pramuka, celana/rok warna pramuka. Pakaian seragam yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dilengkapi pula dengan atribut untuk jenjang SD/MI yaitu badge Bendera Indonesia, OSIS, lokasi/nama kabupaten, topi, dan dasi SD.

Meskipun program-program tersebut yang telah terlaksana dengan baik namun hanya berdampak positif pada aspek komponen biaya tertentu pada biaya personal, sehingga jika merujuk pada Peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah daerah sesuai tupoksinya dalam melayani masyarakat dapat mengalokasikan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi, sehingga kedepannya diperlukan pengalokasian

dana tambahan oleh pemerintah daerah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik miskin berprestasi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) yakni pada beberapa komponen pembiayaan tidak langsung yang bersumber dari APBD. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan memaksimalkan cita-cita Sumbawa Barat guna memberikan bantuan dalam meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali siswa setiap satuan pendidikan baik negeri dan swasta di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Namun, faktanya orang tua di Kabupaten Sumbawa Barat masih perlu mengalokasikan membiayai pendidikan untuk anaknya yang sekolah pada jenjang sekolah dasar yakni untuk memenuhi 11 komponen pembiayaan tidak langsung seperti yang disebutkan di atas sebesar Rp 9.756.647,22/siswa/tahun.

Jika menelaah 11 komponen pembiayaan di atas, terdapat sebagian komponen yang tidak menjadi komponen wajib di setiap sekolah seperti a) uang pangkal/uang masuk, b) iuran rutin sekolah, c) transportasi di sekolah, d) kursus/les di luar kelas, dan e) sumbangan incidental karena sudah didanai oleh pemerintah pusat melalui program BOS dan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui program bus sekolah. Selain itu, ditemukan pula bahwa kelima komponen tersebut tidak muncul pada seluruh sampel penelitian sehingga tidak dapat diklaim sebagai komponen yang wajib ditanggung oleh orang tua peserta didik.

Sehingga, berdasarkan kondisi di atas maka diperoleh 6 komponen prioritas yang menjadi tanggungjawab orang tua peserta didik yaitu a) buku dan alat tulis, b) tas sekolah, c) sepatu sekolah, d) pakaian seragam sekolah, e) pakaian olahraga, dan f) uang saku/jajan siswa dengan rerata besaran biaya di masing-masing komponen untuk setiap peserta didik pertahunnya adalah sebesar Rp.3.423.128,70.

Sehingga berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka diperlukan pengalokasian dana bantuan pembiayaan pendidikan berupa "Program Bariri

Cerdas” yang dibebankan pada APBD Kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan peserta didik miskin berprestasi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) yakni pada beberapa komponen pembiayaan tidak langsung sesuai dengan hasil analisis yang telah dipaparkan di atas.

D. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil Penelitian yang telah dilakukan adalah 1) Pembiayaan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumbawa Barat: a) Biaya investasi (didanai oleh pemerintah melalui dana transfer daerah urusan pendidikan (APBN) dalam bentuk Program BOS dan pengalokasian anggaran program pendidikan di luar transfer daerah (APBD), b) Biaya operasi (didanai oleh pemerintah melalui dana transfer daerah urusan pendidikan (APBN) dalam bentuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan alokasi anggaran program urusan pendidikan di luar transfer daerah (APBD) dan c) biaya personal (didanai oleh pemerintah daerah yang bersumber dari alokasi anggaran program urusan pendidikan di luar transfer daerah (APBD) dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Pengadaan Bus Sekolah serta Program Bantuan Seragam Sekolah) yang dilola sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2) Diketahui Terdapat 6 komponen prioritas yang menjadi tanggungjawab orang tua peserta didik yaitu a) buku dan alat tulis, b) tas sekolah, c) sepatu sekolah, d) pakaian seragam sekolah, e) pakaian olahraga, dan f) uang saku/jajan siswa dengan rerata besaran biaya di masing-masing komponen untuk setiap peserta didik pertahunnya adalah sebesar Rp.3.423.128,70.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: 1) Diperlukan penelitian lanjutan terkait analisis kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan pada jenjang sekolah selanjutnya baik sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Sumbawa Barat untuk melihat seberapa besar kesenjangan kebutuhan dengan alokasi

bantuan biaya yang diperoleh sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyelenggarakan pendidikan guna terselenggaranya pendidikan yang bermutu di Kabupaten Sumbawa Barat; 2) Diperlukan survei azas manfaat dari bantuan PIP terhadap pembiayaan pendidikan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD); 3) Diperlukan pengadaan armada bus Sekolah tambahan untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat karena pada wilayah tertentu hingga saat ini belum mendapatkan pelayanan bus sekolah. Selain itu juga diperlukan pengadaan armada mini bus sekolah untuk menjangkau sekolah-sekolah yang berada pada wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh bus sekolah yang besar. 4) Diperlukan pengalokasian dana tambahan oleh pemerintah daerah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan peserta didik miskin berprestasi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) yakni pada beberapa komponen pembiayaan tidak langsung sesuai dengan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifudin, O., Sonia, N. R., Darmawan, I. P. A., Abbas, D. S., Saputro, A. N. C., Poltak, H., ... & Hasbi, I. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Bandung, Widina Bhakti Persada
- Arsyad, J. (2018). Otonomi Pendidikan Dan Pembiayaan Pendidikan. *Sabilarrasyad: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan*, 3(2), 27-38.
- Asnawi, A. R., Wiyono, B. B., & Sunandar, A. (2021). Policy Evaluation of the Program Indonesia Pintar (PIP) in Indonesia's Education Outcomes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 556-566.
- Caya, C., Rusyadi, R., & Patahuddin, P. (2019). *Evaluasi Program Indonesia Pintar (Pip) Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Kota Balikpapan* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Fattah, N. (2008). *Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori Dan*

-
- Studi Empiris. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9, 1-4.
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 565-578.
- Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 387-404.
- Hakim, L. (2016). *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(1).
- Handayani, N. F., & Huda, N. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sma Negeri Pascadesentralisasi Pendidikan. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(4), 332-341.
- Hastina, H., Safiltri, D. A., Ramadhan, R., & Andika, A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(2).
- Hendriyani, Y. M., & Maqin, D. H. A. (2018). *Dampak Subsidi Pendidikan Bos Dan Kip Pada Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Dan Rumah Tangga Non Miskin Di Wilayah Bandung Timur (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong)* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Inkiriwang, R. R. (2020). *Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Lex Privatum, 8(2).
- Latief, A. M., & Latief, J. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Utilitas*, 1(1), 35-42.
- Mesiono, M., & Haidir, H. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Hikmah*, 17(2), 61-73.
- Muslim, I. B. (2011). *Pembiayaan Program Pendidikan Nonformal (Studi Kasus Oada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tambo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Nida, Q. (2018). Bentuk Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak Hak Pendidikan. *Untirta Civic Education Journal*, 3(1).
- Sabiq, A. R. (2021). *Impelementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar Di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Siyasaah Syari'ah* (Doctoral Dissertation, UIN Fas Bengkulu).
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266-280.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266-280.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Timor, H. (2018). Mutu Sekolah; Antara Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Kinerja Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(1), 21-30.
- Togatorop, M. (2017). Pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu sekolah SMA swasta. *SCHOLARIA: jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(3), 234-240.
- Walayah, S., Dini, S. H., & Syarif, A. (2021). Manajemen pembiayaan pendidikan masa pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 77-98.
-

-
- Wijoyo, H. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Insan Cendekia Mandiri.
- Winarsih, S. (2013). Sistem pembiayaan pendidikan dan otonomi Daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 18(2), 265-286.